For Better Tomorrow

PEMBAHARUAN TEORI PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Oleh :

Prof. Dr. Ir. Eriyatno, MSc

- Deputi Pembiayaan – Kementrian Koperasi dan UKM
- mantan, Staf Ahli Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan – Menko Ekuin
- mantan, Kepala Biro Regional – Bappenas

DESEMBER 2002

Pengantar

Bank Dunia tanggal 3 Oktober 2002, menyatakan bahwa Indonesia berpeluang besar untuk menaikkan pinjaman (hutang) pada tahun mendatang dengan membaiknya pelaksanaan sejumlah "Reformasi" ekonomi. Nilai rata-rata pinjamannya (hutangnya) untuk Indonesia dinaikkan menjadi 1 milyar Dollar AS, dari nilai sekitar 400 juta Dollar AS. Tanggal 19 Nopember 2002, pemerintah merencanakan target pinjaman dari CGI untuk RAPBN 2003 sebesar 29.9 triliun, naik 3.1 triliun dari tahun 2002.

Apakah berita ini merupakan berita "gembira" dan atau ditanggapi dengan persepsi lain? Tulisan ini disusun untuk memberikan masukkan bagi para pemikir dan pengambil kebijakan, melalui introduksi paradigma baru tentang teori Pembangunan Perekonomian Nasional. Dengan asumsi bahwa kita sependapat, badai krisis ekonomi belum berlalu dari persada nusantara. Apalagi dengan dampak tragedi di Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang menambah tingkat kesulitan pemulihan krisis di Indonesia.

Dasar Pemikiran

Memasuki abad ke-21, merupakan tahapan awal dari era perekonomian baru yaitu **era sintesis** secara filosofis dan teknologis, di mana sebagai penggerak utama adalah permintaan konsumen terhadap barang dan jasa, yang bisa merasa puas tanpa menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, dan penggunaan energi yang minimal. Sintesis merupakan keterpaduan aktivitas dalam ilmu pengetahuan, keteknikan dan profesi-profesi lain dari ilmu terapan, namun keberadaannya belum diterima secara umum. Pada awal milenium ke-3, dunia pendidikan negara maju berubah, lebih berorientasi pada pemaduan instruksi dan praktek secara sintesis untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing global.

Sintesis akan jauh lebih bermanfaat sebagai suatu pendekatan tidak hanya untuk membangun sistem artifisial, tetapi juga pada penyelesaian persolan yang amat komplek. Pendekatan analisis mendominasi selama abad sebelumnya, sedangkan sintesis tumbuh berkembang sesuai dengan kepentingannya sebagai hasil dari meningkatnya pembangunan dan pembuatan barang dan jasa. Sintesis juga memberikan suatu kerangka acuan untuk mengarahkan analisis, riset, pengembangan, manajemen dan pendidikan.

Analisis dan sintensis merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses berfikir yang mengeksploitasi pemikiran kreatif dan inovatif. Analisis sangat dominan dalam mempelajari pengetahuan tentang sistem yang ilmiah. Sedangkan sintesis, dominan dalam pengembangan sistem artifisial yang meliputi; antarmuka, interkoneksi, terpadu, interelasi, interdisiplin. Namun dalam kenyataannya sangat sulit atau hampir tidak mungkin untuk murni sintesis, sehingga praktisnya merupakan penggabungan antara analisis dan sintesis.

Dalam proses pembangunan nasional, karena dampak krisis sejak tahun 1997, menjadi lebih kompleks khususnya di bidang perekonomian. Penggunaan sintesis akan meningkatkan kecenderungan positif, bahwa mekanisme pembangunan akan menjadi sistematik dengan pendekatan koordinasi, integrasi, interdisiplin, imajinatif dan holistik. Sintesis akan lebih dominan karena informasi tentang fenomena alam dan imajinasi manusia dikombinasikan untuk menghasilkan sistem yang artifisial. Oleh karena itu, hasil dari sintesis akan menjadi subyek, tidak hanya dalam arti fisik material tetapi juga dalam tata kehidupan manusia. Disinilah titik singgung antara konsep sintesis dengan **paradigma baru** pembangunan perekonomian nasional.

Sintesis merupakan suatu perilaku, pendekatan dan prosedur yang diikuti oleh tindakan untuk memenuhi tujuan dalam menghasilkan sesuatu. Sintesis merupakan cara berpikir komprehensif untuk membuat sesuatu dan memiliki peran yang penting dalam mengembangkan produk atau jasa baru dengan dasar pemikiran ilmiah. Teori pembangunan nasional seyogyanya dikaji ulang melalui cara berpikir sintesis, dan bilamana diperlukan dilakukan reformasi daripada *mind-set* para penyelenggara negara.

Analisa komparatif

Secara garis besar menurut beberapa pakar ekonomi global ada empat pola pembangunan perekonomian bangsa yang telah diterapkan di dunia. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Pertama, model negara kesejahteraan *(welfare state)* seperti yang diterapkan oleh negara-negara Skandinavia (Swedia, Finlandia, Denmark), atau yang tatanan masyarakatnya mengadopsi aspirasi kaum sosial-demokrat seperti Perancis, Spanyol, Jerman dan Inggris. Ciri-ciri utamanya adalah :

1. Sistem perpajakan yang progresif dipadu dengan sistem jaminan sosial yang sangat efektif untuk melindungi kaum lemah.
2. Pelaku swasta menjadi agen pertumbuhan ekonomi yang efisien, tanpa distorsi dari pelaku birokrasi atau negara.
3. Kekuatan politik serikat buruh sangat menentukan, bersanding dengan sistem demokrasi parlementer yang efektif. Partai oposisi berperan besar sehingga proses *check and balance* berjalan dengan baik.

Kedua, model negara kemakmuran ala Jepang dengan ciri-ciri utamanya sebagai berikut:

1. Negara merupakan pusat pengambilan keputusan jangka panjang, strategi pertumbuhan ekonomi, konsensus antarlembaga dalam pengembangan teknologi dan lain-lain. Ditingkat pelaksanaan, negara tidak banyak campur tangan. Pihak swasta yang sepenuhnya

menjabarkan dan merealisasikan keputusan-keputusan jangka panjang tersebut.
2. Negara dan kaum pengusaha bekerja sama menghadapi pasar dunia.
3. Terdapat sistem subsidi untuk bahan kebutuhan pokok yang menjamin berjalannya proses redistribusi yang efektif atas hasil pertumbuhan ekonomi kepada petani dan kelompok sosial berpenghasilan rendah lainnya.
4. Peranan serikat buruh dalam proses pengambilan keputusan ekonomi politik, dapat dikatakan tidak ada, tetapi hal ini dikompesasikan dengan proses internal perusahaan dalam bentuk

Ketiga, model populis yang diterapkan oleh negara-negara berhaluan sosialis, misalnya RRC. Ciri-ciri penting adalah:
1. Kebijakan otoriter untuk memaksa setiap pelaku ekonomi mendapat penghasilan sesuai kebutuhannya melalui pembangunan sistem komunal secara besar-besaran, dalam rangka upaya langsung untuk pemecahan masalah kependudukan dan kemiskinan massal.
2. Monopoli pengambilan keputusan oleh kelompok elit politikus-birokrat yang menutup hak berbeda pendapat dalam menentukan arah semua subsistem kenegaraan.
3. Peran pemerintah yang sangat besar dalam melakukan investasi publik dan kontrol moneter untuk menjamin efektivitas sistem.

Keempat, pola perekonomian pasar bebas yang berdasarkan teori neo-klasik dengan praktek deregulasi dan privatisasi yang dikenal sebagai *Washington Consensus* di Amerika Serikat. Ciri penting pola ini adalah:
1. Kepercayaan penuh kepada mekanisme pasar (uang) dan sektor swasta, baik dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengembangan teknologi, maupun penciptaan kesempatan kerja. Penanggulangan kemiskinan diluar sistem produktif, dilakukan oleh lembaga-lembaga karitatif (santunan), yang dibangun oleh pengusaha, politisi, yayasan sosial.
2. Peran negara dibatasi hanya sebagai unsur pertahanan-keamanan dan pengawasan untuk mencegah monopoli dan kartel.
3. Pemberlakuan pajak yang rendah dan suku bunga rendah, serta sistem insentif lain untuk mendorong sektor swasta menjalankan peranannya secara maksimal.
4. Pengurangan subsidi pemerintah ala pola negara kesejahteraan (misalnya jaminan kesehatan bagi kelompok sosial rendah dan pengangguran) karena subsidi seperti ini dianggap menciptakan kemalasan kaum tersebut.

Para pendiri Republik Indonesia tampaknya cenderung berhaluan searah model negara kesejahteraan *(welfare state)*, dengan merujuk pasal-pasal terkait dalam UUD 1945 dan sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengapa reformasi teori?

Pembangunan ekonomi Indonesia akan terus dibangun dengan menganut ekonomi pasar. Apabila landasan mekanisme pasar yang digunakan sebagai acuan adalah pasar bebas sebagaimana yang dikembangkan atas dasar paradigma ekonomi neo-klasik, yang ternyata telah banyak mengalami kegagalan dalam dunia nyata, maka hal tersebut tentu dapat berbahaya sehingga perlu dipahami tentang landasan teoritisnya.

Negara Indonesia yang sedang mengaplikasikan teori pasar bebas ala neo-klasik, dengan mempraktekkan liberalisasi pasar uang dan tatanan kapitalisme sejak orde baru, ternyata dinilai tidak sukses dengan indikasi makin meledaknya jumlah hutang luar negeri baik pemerintah maupun swasta. Dengan terjadinya krisis moneter maka terpuruknya sektor perbankan telah melumpuhkan sendi-sendi perekonomian yang dampaknya masih dirasakan sektor riel hingga kini.

Jumlah obligasi untuk merekapitulasi bank-bank yang bermasalah mencapai Rp. 430 triliun, dengan jumlah bunga keseluruhan yang harus dibayar pemerintah sebelum obligasi rekap dilunasi adalah Rp. 600 triliun. Saat ini pemerintah dibebani kewajiban pembayaran bunga obligasi rekap yang berkisar antara 60 triliun per tahun.

Beruntunglah persoalan politik dan masalah krisis kepercayaan yang melanda negeri ini telah mulai pulih dengan reformasi pemerintah yang ditengarai adanya perhatian bagi tumbuhnya tatanan ekonomi yang berlandaskan keadilan dan anti kemiskinan *(pro poor)*. Sayangnya, pakar ekonomi, didasarkan atas paradigma kapitalistik yang mengacu pasar uang sebagai andalan untuk membangun perekonomian, masih sering memberikan sinyal yang membingungkan. Kredibilitas pemerintahan misalnya, dipertanyakan hanya dengan melihat indikator yang sangat parsial, yaitu melemahnya nilai tukar mata uang atau indeks harga saham yang melemah, dan ini dianggap sebagai sentimen negatif pasar. Seolah-olah reaksi pasar hanya ditunjukkan oleh situasi perdagangan uang dengan berlindung dibalik konsep ekonomi pasar yang dipromosikan sekelompok pakar yang oleh Aga Khan disebut sebagai *economic fundamentalist*.

Charles Hall (1991) mengemukakan, bahwa ekonomi neo-klasik adalah suatu pengetahuan yang eksperimental, karena teori-teori yang dibangun tidak pernah dapat diuji dalam dunia nyata. Lebih jauh dikemukakan, bahwa ekonomi neo-klasik mengukur output hanya dengan indikator harga, dan mengabaikan faktor lingkungan dan aspek-aspek sosial. Model-model yang dikembangkan adalah model-model keseimbangan statik yang **tidak pernah terjadi** di dunia nyata. Lebih dari itu semua, landasan dasar ekonomi neo-klasik adalah, bahwa pasar bebas akan dapat mengalokasikan sumberdaya secara lebih efisien. Namun konsepsi tidak pernah dapat dibuktikan secara empiris. Kebijakan ekonomi pasar bebas yang diaplikasikan lebih dari 15 tahun di Inggris, Kanada dan Selandia Baru telah gagal secara sangat menyedihkan (Weekes, 1995 dan Khan, 1998). Celakanya, arah inilah yang dianut para perancang pembangunan perekonomian di Indonesia.

Paham ekonomi neo-klasik yang merupakan landasan bagi penganut aliran ekonomi modern *(mainstream economist)*, dikembangkan oleh ahli moneter Milton Friedman di tahun 1956. Faham pasar bebas ini sebenarnya merupakan produk dari pemikiran faham ekonomi sejak era klasik. Asas pokok ekonomi pasar adalah bekerjanya tangan tak terlihat *(the invisible hand)* seperti dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *The Theory of Moral Sentiment*. Walaupun inti ajarannya didasarkan pada cinta diri dan empati manusia, namun ajaran ini juga menekankan sifat egoisme manusia, dan perkembangan selanjutnya pada tiga hal pokok:

1. Kebebasan kepemilikan individu;
2. Pasar bersaing sempurna;
3. Faktor harga sebagai sinyal utama kegiatan ekonomi.

Penerapan sistem ekonomi pasar bebas yang menekankan pada aspek deregulasi keuangan dan kebebasan perdagangan dunia, pada akhirnya bisa mengakibatkan masalah individualisme yang berkaitan dengan aspek moral. Asumsi-asumsi dasar ekonomi neo-klasik adalah persaingan sempurna, analisa marginal utilitas, yang masing-masing menurunkan hukum-hukum *law of diminishing return,* maksimisasi keuntungan dan *law of diminishing marginal utility*. Selanjutnya dari sini, menurunkan kurva penawaran dan permintaan, yang diramu dengan teori kwantitas uang, keseimbangan statik dan kedaulatan konsumen *(consumer sovereignity)* memunculkan ekonomi **pasar bebas** (lihat lampiran 1). Ditilik dari asumsi-asumsi dasar yang digunakan, sebenarnya faham ekonomi neo-klasik berdiri di atas asumsi yang sangat rapuh. Oleh karena itu paradigma baru dan alternatif teori untuk pembangunan ekonomi di Indonesia perlu diprakarsai pada suasana reformasi ini.

Munculnya faham **ekonomi alternatif**, misalnya ekonomi kesejahteraan, *social-market economy* atau ekonomi yang didasarkan pada ajaran agama seperti ekonomi *syari'ah*, dilandasi oleh adanya ketidakpuasan dari pemikir, pelaku dan pengambil kebijakan tentang faham dan penerapan ekonomi kapitalisme murni. Ketidakpuasan tersebut terutama disebabkan oleh penerapan ekonomi kapitalis murni yang dalam kenyataannya lebih mengarah kepada eksploitasi pihak lemah oleh pihak yang kuat, dan kurang memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Sedangkan faham ekonomi alternatif yang mulai berkembang saat ini memberikan perhatian pada variabel moral dan etik. Dengan memasukkan variabel ini, perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, pelaku ekonomi secara keseluruhan tertuju pada aspek distribusi yang adil atau dalam bahasa yang lebih populer disebut sebagai sistem ekonomi dalam pasar yang manusiawi (*humane market*).

Menurut Mubyarto (2002), ilmu ekonomi yang kini diajarkan di Indonesia yang sering dikatakan sebagai ilmu ekonomi positif memang tidak perlu dianggap sepenuhnya keliru. Tetapi jika ilmu ekonomi diharapkan memberikan sumbangan pada pembangunan bangsa Indonesia, sebaiknya di reorientasi ke ilmu **ekonomi kelembagaan** melalui pelaksanaan penelitian-penelitian lapangan yang serius secara berkelanjutan.

Kritik terhadap teori

Model ekonomi neo-klasik yang mekanistik semula dideskirpsikan oleh W.S. Jevons dalam paper yang ditulis pada tahun 1862. dan dalam buku yang dipublikasikan pada tahun 1871. Model ini dikembangkan lebih lanjut oleh Walras (1974), yang mengasumsikan suatu regim kompetisi bebas/sempurna, membuat suatu model matematis dimana faktor-faktor produksi, dan harga secara otomatis menyesuaikan pada keseimbangan. Jadi dia menghubungkan secara bersama-sama teori-teori mengenai produksi, perubahan, uang dan modal, dan secara bebas mengembangkan teori utilitas marginal dari nilai (*marginal utility theory of value*). Konsep-konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh Marshall (1890), yang dianggap sebagai bapak Mikro ekonomi.

Mirowski (1989) menemukan bahwa model-model ini didasarkan pada fisika dan energi tahun 1870-an, dimana utilitas dalam ekonomi diganti konsep energi dalam fisika. Konsep marginal disusun sehingga kalkulus dapat digunakan. Model keseimbangan statik marginal dipakai karena menurut Joan Robinson (1974), penggunaan model-model interaktif secara dinamis tentunya akan sangat rumit.

Namun model-model tersebut ternyata merupakan **ilusi** belaka, dimana teori ekonomi neo-klasik yang baru gagal disesuaikan dengan rumusan fisika tahun 1870-an. Selama periode yang sama, F.W. Taylor (1911) memulai kajian analisa secara mendalam mengenai proses-proses produksi yang menjadi gerakan manajemen ilmiah, yang mendirikan disiplin-disiplin teknik industri, pengendalian produksi dan manajemen persediaan serta penganggaran biaya dan akuntansi standar.

Gerakan manajemen ilmiah tersebut diabaikan oleh para ekonom neo-klasik yang tidak pernah melakukan suatu penelitian ilmiah **empiris** yang sifatnya komparatif untuk membuktikan teori-teori mereka. Model-model yang terus dikembangkan, dibuat berdasarkan sekumpulan asumsi yang tidak eksis (ilusi) dalam kenyataan, sehingga terjadinya pemaksaan dalam mengubah fakta-fakta agar sesuai dengan teori yang dikembangkan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat masing-masing asumsi yang digunakan.

1. **Persaingan sempurna**
   Persaingan sempurna tidak ada dalam dunia kapitalisme nyata, dimana telah berkembang menjadi suatu bentuk yang dicirikan oleh kelompok-kelompok besar perusahaan industri, yang melakukan pasar-pasar monopoli atau oligopoli dan berlingkup multinasional.

2. **Analisis marjinal**
   Analisis marjinal tidak dapat diaplikasikan dalam dunia nyata. Perusahaan-perusahaan merencanakan operasi-operasi mereka menggunakan anggaran penjualan (*budgets of sales*) dan produksi untuk mendesain bauran produk dan pasar dalam istilah agregat tahunan (*annual aggregates*), yang akan menghasilkan tingkat keuntungan yang paling memuaskan. Dalam prakteknya, adalah sulit menghitung biaya-biaya marginal dan pendapatan (*revenues*).

3. **Kegunaan**
   Konsep kegunaan (*utility*) telah disanggah oleh ahli psikologi, dengan mengemukakan bahwa kegunaan bukan merupakan motivator utama dalam tingkah laku manusia. Abraham Maslow mengembangkan sebuah hirarki kebutuhan bertingkat lima, mulai dengan kebutuhan fisiologi pada level terendah, dan kebutuhan-kebutuhan psikologi seperti aktualisasi pribadi, pengembangan diri dan kreativitas pada level tertinggi.

4. **Hukum kegunaan marjinal yang menurun**
   Hukum utilitas marjinal yang menurun (*The Law of Diminishing Marginal Utility*) yang mengasumsikan bahwa harga turun jika permintaan meningkat, pada prakteknya tidak muncul dalam banyak kasus. Secara luas, produsen menetapkan harga selama periode musim penjualan atau periode anggaran. Mereka tidak bersedia menurunkan harga jika pesanan meningkat di atas tingkat anggaran, karena hal ini akan menguntungkan beberapa pelanggan atas biaya pelanggan yang lain, yang akan berakibat fatal bagi hubungan pelanggan di masa depan.

5. **Hukum pendapatan yang semakin menurun**
   Hukum pendapat yang semakin menurun (*The Law of Diminishing Return*), yang mengasumsikan bahwa biaya-biaya produksi meningkat jika volume output meningkat, pada prakteknya tidak terjadi. Para pakar industri dan ahli akuntansi biaya mengetahui bahwa dalam fasilitas produksi massal, biaya per unit menurun jika volume meningkat.

6. **Maksimisasi keuntungan (*profit maximization*)**
   Maksimisasi keuntungan telah dipertanyakan oleh Herben Simon (1979), yang menganggap bahwa para manajer membuat keputusan-keputusan yang cukup bagus, atau paling memuaskan pada suatu keadaan tertentu. Selain itu, adalah sangat sulit untuk menghitung biaya-biaya dan pendapatan marginal. Dengan demikian kurva penawaran dan permintaan tidak berlaku lagi, karena hukum keuntungan yang menurun dan utilitas marginal yang menurun, yang merupakan dasar dibangunnya kurva tersebut, tidaklah absah.

Prigogine (1978) telah menunjukkan, bahwa sistem-sistem organik berada pada keadaan yang jauh dari keseimbangan (*equlibrium*). Keseimbangan statik yang digunakan hanyalah keseimbangan harga. Hal ini mengabaikan semua variabel lain, seperti tingkat kesempatan dan kerja dan kapasitas produksi, inflasi, neraca pembayaran, aliran modal masuk dan keluar, biaya-biaya sosial dan sebagainya.
Jika demikian halnya, maka keseluruhan bangunan besar ekonomi neo-klasik, dengan *laissez-faire* dan rasionalisasinya telah ambruk, karena teori itu didasarkan pada suatu pondasi ilusi yang tidak mencerminkan struktur dunia nyata seperti diharapkan oleh para pemikirnya. Apa yang diperlukan di abad ke-21 adalah suatu paradigma baru dalam ekonomi pembangunan yang mengabaikan rumusan teoritis berdasarkan bilangan imaginer ($\sqrt{-i}$).

Menurut teori ekonomi neo-klasik yang umum dirujuk para pakar ekonomi kita, dalam pasar bersaing sempurna akan terjadi alokasi sumberdaya yang paling efisien. Sejalan pengertian tersebut akan terjadi apa yang disebut pareto optimal. Kesimpulan ini berlandaskan atas beberapa asumsi dasar, diantaranya adalah bahwa setiap produsen dan konsumen bebas keluar-masuk pasar (*no exit-entry barrier*), dan setiap aktor yang terlibat dalam pasar memiliki informasi yang sempurna tentang situasi pasar. Padahal dalam dunia nyata informasi yang sempurna tidak dapat ditemui, dan biaya untuk memperoleh informasi sangat tinggi, maka ekonomi pasar seringkali digantikan oleh **institusi non-pasar**.

Pemenang nobel ekonomi 2001, Stiglitz menyatakan bahwa informasi yang asimetris sangat mempengaruhi setiap aspek perekonomian pasar dan mungkin yang terpenting adalah pasar modal. Stiglitz, mantan staf Bank Dunia, menyatakan lembaga dana internasional masih menggunakan teori ekonomi yang usang dimana kepentingan negara-negara miskin yang dibantunya kurang diperhatikan.

Dengan demikian, penentuan pilihan apakah suatu kegiatan ekonomi akan dilakukan dengan sistem pasar atau dalam sistem organisasi non-pasar serta institusi lainnya, sangat ditentukan oleh pertimbangan biaya transaksi (*transaction cost*). Pada dasarnya pilihan yang diambil oleh penentuan kebijakan tentu saja akan didasarkan pada biaya transaksi yang minimum, dan adanya intervensi pemerintah yang terbatas dalam bidang ekonomi untuk mengkoreksi kegagalan pasar.

Pembaharuan Teori

Teori ekonomi baru di dunia masih dapat didasarkan pada fisika, tetapi fisika modern. Fisika modern juga mencakup karakter evolusi seperti yang sekarang dikenal dengan Ekonofisika oleh Paul Omerod. Pendekatan-evolusioner dari Boulding (1981) sebagaimana dikutip oleh Week (1994), mengakui bahwa rumusan evolusi telah diperhitungkan sebagai suatu sistem yang tidak seimbang dari awalnya, dan bahwa sistem-sistem sosial melanjutkan proses evolusioner ini dengan **ketidak-seimbangan yang konstan**.

Model-model sistem ekonomi masih dapat dikembangkan, tetapi sebaiknya tidak mengasumsikan keseimbangan statik atau parameter-parameter yang konstan, karena hal itu tidak pernah konstan untuk jangka lama. Sistem-sistem ekonomi, sebaiknya juga tidak otomatis menuju pasar bebas untuk mendapatkan suatu posisi *equilibrium.* Pasar bebas mengasumsikan bahwa tidak ada sumberdaya yang dapat habis terpakai (*exhaustible*), dan rumusan model yang saat ini digunakan masih mengabaikan faktor pengangguran, masalah-masalah neraca pembayaran, inflasi, dan pergerakan-pergerakan modal. Jika dibiarkan demikian, sistem-sistem pasar bisa terjebak pemborosan sumber daya dan menghasilkan pengangguran atau bekerja kurang dari kapasitas penuh.

Permodelan seharusnya dilakukan untuk lebih mengembangkan rumusan perencanaan untuk mencapai masa depan yang diinginkan. Rencana alternatif diformulasikan dan hasilnya dievaluasi dengan proses-proses simulasi. Rencana tersebut akan menentukan tingkat intervensi pemerintah yang diperlukan untuk mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan dalam cara yang paling logis dan adil. Sistem pendidikan kemudian dikembangkan untuk menjamin peningkatan berkelanjutan dalam hal pengetahuan dan penciptaan tingkat kecerdasan serta keterampilan yang kompetitif secara internasional.

Konsep-konsep dasar mengenai tingkat kemakmuran negara seperti GDP perlu direvisi. Saat ini, konsep GDP hanya memasukan nilai moneter, dan tidak memasukkan nilai-nilai non moneter. Pertumbuhan seharusnya diarahkan tidak pada pemanfaatan sumberdaya alam, tetapi pada pembangunan manusia, pendidikan dan perawatan kesehatan. Keseluruhan faktor dan elemen ekosistem juga perlu dimasukkan, dimana kebijakan-kebijakan publik seharusnya diintegrasikan.

Koreksi teoritis tersebut di akomodasikan pada gugus **ilmu ekonomi kelembagaan** yang menekankan pada kerjasama antar manusia dan tindakan kolektif dalam mencari solusi dari permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi.

Paradigma Ekonomi yang baru dapat menggabungkan tinjauan mengenai sistem-sistem ekonomi dengan struktur Analisis Sistem Kehidupan (*LSA-Living Systems Analysis*) yang dikembangkan oleh Miller (1978) dan menggunakan proses-proses perencanaan strategis yang mirip dalam paradigma manajemen. Intinya adalah bahwa tidak semua perencanaan akan dipusatkan, tetapi bahwa pemerintah akan meng adopsi suatu peranan sebagai pemandu untuk menjamin bahwa industri-industri spesifik didorong untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Dalam proses ini, beberapa tujuan mungkin saja tetap akan harus disuboptimisasi sebagai upaya untuk mengoptimalkan kinerja sistem tersebut sebagai satu totalitas. Hal ini bukan masalah harus ada intervensi pemerintah atau tidak, melainkan lebih pada tujuan untuk memberikan arahan tingkat intervensi yang perlu untuk dilakukan oleh pemerintah.

Sebagai contoh peran pemerintah dalam penyehatan dunia perbankan saat ini. Sistem perbankan perlu deregulasi untuk menjamin bahwa pertumbuhan pasokan uang tidak melampaui pertumbuhan produktivitas. Bahkan lebih dari itu sistem perbankan konvensional yang mengandalkan pada perhitungan bunga (*interest*) mulai dipertanyakan, karena program rekapitalisasi selama lima tahun ini di Indonesia telah terbukti tidak otomatis mendorong sektor riil untuk bergerak. Apabila digunakan pendekatan manajemen ilmiah maka konsep lembaga keuangan alternatif dan sistem bagi hasil menjadi dimungkinkan.

Telaah lanjutan

Dari bahasan sebelumnya tampak bahwa sistem ekonomi neo-klasik sangat banyak memiliki kelemahan teoritis yang dapat dibuktikan secara empiris. **Kesenjangan sosial** antarindividu dan antar golongan akibat merajalelanya fungsi uang sebagai komoditi yang diperdagangkan serta asumsi keseimbangan kekuatan antar pelaku ekonomi yang tidak pernah terjadi, telah menghasilkan sistem ekonomi yang justru menuju kearah monopolistik, eksploitasi dan tidak adil.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa peranan pasar sangat penting. Pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat. Pasar memberikan petunjuk kepada para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan usaha, dan dapat menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien, dan pasar memberikan perangsang untuk memperoleh keahlian modern.

Namun pasar bebas dapat menyisihkan masyarakat kecil, sebab pasar bebas selalu menuju kearah monopolistik dari para orang kuasa (*the ruling class*). Oleh karena itu pasar bebas harus ditinggalkan, karena pada hakekatnya adalah proses pelelangan dimana yang kuat modalnya dialah yang memenangkan. Pasar bebas tidak dapat menjamin cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasar bebas tidak memberikan akses sumberdaya ekonomi terhadap yang miskin. Misalnya usaha mikro yang tidak memiliki agunan (*colateral*) akan ditolak usulan kreditnya. Upaya privatisasi dapat menyerahkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak ke tangan swasta dan pemodal asing.

Karena itu, **etika bisnis** antarpelaku ekonomi seyogyanya adalah si kuat tidak menyalah-gunakan kekuatannya untuk merampas nilai tambah yang menjadi hak si lemah. Mobilitas sumberdaya, termasuk sumberdaya modal, yang sempurna haruslah diartikan sebagai mencairkan egoisme yang melekat pada hak individu, karena manusia bermoral akan mengetahui benar bahwa kepemilikan adalah titipan (amanah) yang didalamnya ada bagian untuk kepentingan bersama. Uang tidak lagi digunakan sebagai tujuan spekulasi, tetapi dikembalikan pada fungsinya, yaitu sebagai alat tukar dan berjaga-jaga, bahkan proporsi sebagai alat berjaga-jaga sebenarnya sangat kecil sekali. Dengan demikian sektor produksi (riil) akan berkembang dengan pesat, kesempatan kerja akan terbuka lebar, roda perekonomian akan bergairah dan pendapatan per kapita akan meningkat. Tata perekonomian akan diarahkan oleh inovasi dan bukan bersifat konservatif.

Informasi yang menyebar tidak sempurna harus dipahami bahwa yang menguasai informasi tidak harus menutup diri untuk kepentingan orang lain. Persaingan seharusnya beretika sportivitas, yang kalah tetap dapat hidup sebagaimana para atlet yang kalah. Mereka tersingkir tetapi tidak dimatikan, tetapi terpelihara sebagai mitra berlomba, tetap ada *caring for other.* Inilah asas persaudaraan / kekeluargaan yang sebenarnya dikenal oleh gerakan *peoples economy* (ekonomi kerakyatan) di seluruh dunia.

Selanjutnya dapat dijabarkan pendapat Anthony Giddens dalam *The Third Way* (1998) yaitu, memanfaatkan dinamika pasar sambil tetap selalu memikirkan kepentingan umum. Kesemua itu dicoba dirangkumkan pada pembaharuan teori pembangunan ekonomi yang disebut SEKAR (Sistem Ekonomi Kerakyatan).

KONSEPSI SEKAR

Tanpa melakukan redefinisi, kata pokok **ekonomi** pada SEKAR adalah salah satu dari empat aspek kehidupan bangsa, jadi bukan salah satu dari bidang pembangunan. Sedangkan kata sanding **kerakyatan** dipetik dari sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Apabila kedua kata tersebut disandingkan untuk pembangunan nasional, maka pengertiannya menjadi pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat, dilaksanakan disemua aspek kehidupan bangsa, dengan senantiasa harus merupakan perwujudan Wawasan Nusantara serta memperkukuh Ketahanan Nasional.

Sesuai dengan *Soft System Methodology* (SSM), maka setiap kajian sistem di strata direktif harus mampu menghasilkan buah pemikiran tentang **misi** system itu sendiri. Menetapkan misi memerlukan visi yang digali dari dasar dan falsafahnya. Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan informasi, dalam telaah Sistem Ekonomi Kerakyatan ini dapatlah kiranya visi diserap dari UUD 1945 pasal 27 yaitu :

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Dari sini kita dapat menemukenali misi SEKAR yang pokok yaitu penyediaan lapangan pekerjaan, serta mewujudkan taraf hidup yang layak bagi seluruh warga negara.
Lebih lanjut, apabila diterjemahkan dalam direktif kebijaksanaan pembangunan, maka SEKAR mempunyai misi luhur untuk mengupayakan aspek perekonomian bangsa yang selalu berpihak pada kepentingan rakyat banyak *(common people)*. Barangkali lebih pas menggunakan istilah rakyat banyak daripada rakyat kecil yang seringkali dipersinggungkan dengan karakter yang lemah. Selain itu, rakyat banyak mencerminkan nuansa positif dari kekuatan dan bukan hanya ketidakberdayaan.

Bagaimana juga, di Indonesia rakyat banyak umumnya mencakup kelompok berpenghasilan rendah dan belum bisa menikmati hasil pembangunan setelah lebih 50 tahun merdeka. Dengan kepemihakkan kepada mereka, sudah jelas SEKAR tidak boleh mengacu pada teori ekonomi yang ditelorkan oleh Adam Smith, yang pada tahun 1776, menyatakan :

"Without unequal distribution of income, economic growth is not possible, for the whole of the yearly output will be consumed".

Maka makin jelaslah arahan SEKAR, bahwa turunan *(derivasi)* apapun dari teori tersebut diatas yang secara sadar merekayasa ketidakmerataan, harus direvisi. Karena bangunan SEKAR berdiri dari pilar-pilar Pancasila, dimana Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah salah satu silanya.

Hasil **penjenjangan** SEKAR dapat dilihat pada gambar 1. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan catatan, bahwasanya fokus ternyata Perekonomian Rakyat yang bersemangat swadaya , jadi pengertian kemandirian sudah jelas dicanangkan. Melalui masukan para ahli, dan diolah dengan Matrik Komparatif Berpasangan, maka kebijaksanaan yang mendapat nilai tinggi adalah :

1) Penumbuhan iklim yang memacu prakarsa dan sumberdaya masyarakat;
2) Pembinaan Usaha Informal dan Tradisional;
3) Pencegahan Monopoli dan Monopsoni yang merugikan masyarakat.

Dari segi aktor, yana paling ditekankan peranannya justru instansi pemerintah. Dengan demikian dalam SEKAR, ternyata masih dibutuhkan intervensi pemerintah. Hasil analisa ini tentu saja masih bisa diperdebatkan. Tapi paling tidak kita mulai memahami di strata strategis, beberapa perihal yang bias jadi masukan ke strata selanjutnya.

Gambar 1. Kerangka Hirarki Sistem Ekonomi Kerakyatan

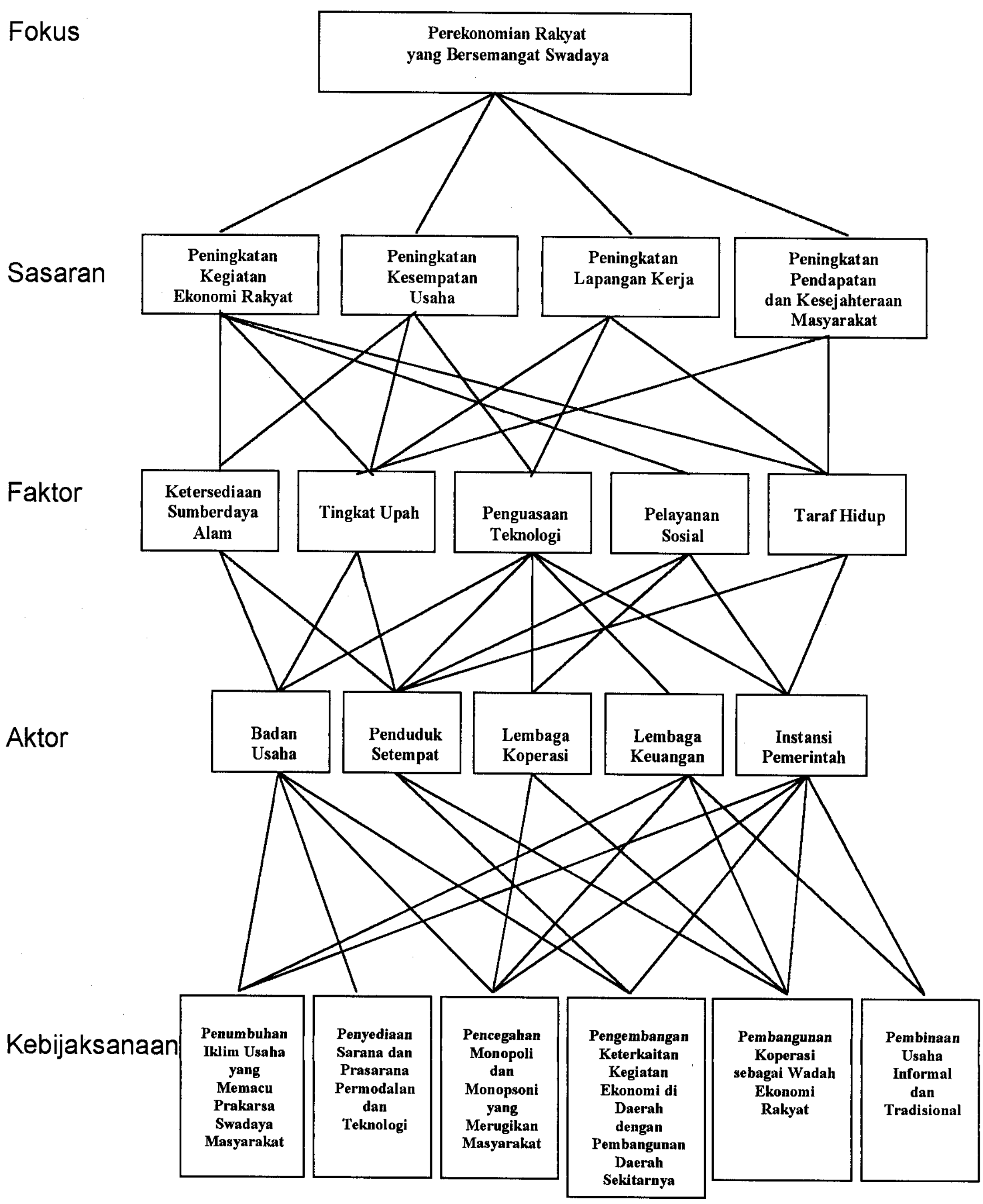

OPERASIONALISASI SEKAR

Taktik **titik tumbuh** untuk SEKAR adalah operasionalisasi konseptual. Titik tumbuh berarti suatu unit kegiatan yang spesifik lokal, yang patut dikembangbiakkan, dan pada gilirannya secara spiraltik menghimbas ke titik-titik lainnya. Taktik ini sangat effektif di pedesaan dan di daerah tertinggal, karena tidak membutuhkan dukungan infrastruktur terpusat *(growth centre)* yang mahal. Pada beberapa temuan lapang, titik tumbuh untuk program SEKAR di daerah pedesaan yang ditemukenali adalah :

1) agroindustri kecil dan usaha lepas panen komoditi pertanian;
2) pariwisata alam dan budaya;
3) jasa bangunan dan perbengkelan;
4) warung makanan dan serba ada;
5) industri rumah tangga kerajinan dan hasil seni;
6) kebun bibit.

Karena sifatnya yang spesifik lokal, maka variasi titik tumbuh pasti banyak. Oleh karena itu sulit dilakukan generalisasi dan standardisasi.

Titik masuk adalah proses "kulo-nuwun" yang mengacu pada sosio-budaya setempat. Hasil seminar yang disponsori World Bank (1992) merekomendasikan *"used credit as an entry point to economic and social activities".* Apabila kita rujuk kembali pada strata Direktif, maka rekomendasi tersebut bisa dipertanyakan.
Hasil observasi pada program pemberdayaan masyarakat bahwa titik masuk sebaiknya adalah bernilai kemasyarakatan, misalnya :

1) perbaikan lingkungan hidup, seperti penyediaan listrik, air bersih, MCK dan tempat sampah;
2) peribadatan, seperti perbaikan mushola;
3) santunan sosial, seperti yatim piatu dan beasiswa.

Titik masuk yang merasuk dapat merebut hati rakyat banyak, dan inilah kunci keberhasilan dan keberlanjutan peran serta masyarakat pada SEKAR yang dirancang. Taktik ini pasti mampu menumbuhkan iklim yang memacu prakarsa dan sumberdaya masyarakat setempat.

Motor penggerak SEKAR pasti membutuhkan bensin yaitu dana. Taktik yang berhasil, memerlukan **dana leburan** *(blending fund)* yaitu pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dengan masing-masing implikasinya. Sudah jelas SEKAR tidak mungkin menggunakan dana sepenuhnya dari bank komersial, dan masih tidak dianggap patut bila sumber dana semua bersifat hibah. Jadi untuk setiap program SEKAR harus direkayasa dana leburan yang untuk itu secara simultan perlu dilakukan beberapa kegiatan seperti terlihat di gambar 2. Pada saat ini, sudah cukup banyak dana khusus yang bisa dileburkan seperti kredit usaha mikro dan kecil, simpan pinjam di koperasi, modal ventura, dana bergulir dan sebagainya. Di pedesaan kegiatan ini dapat didukung oleh berbagai lembaga keuangan alternatif.

Gambar 2. Struktur Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

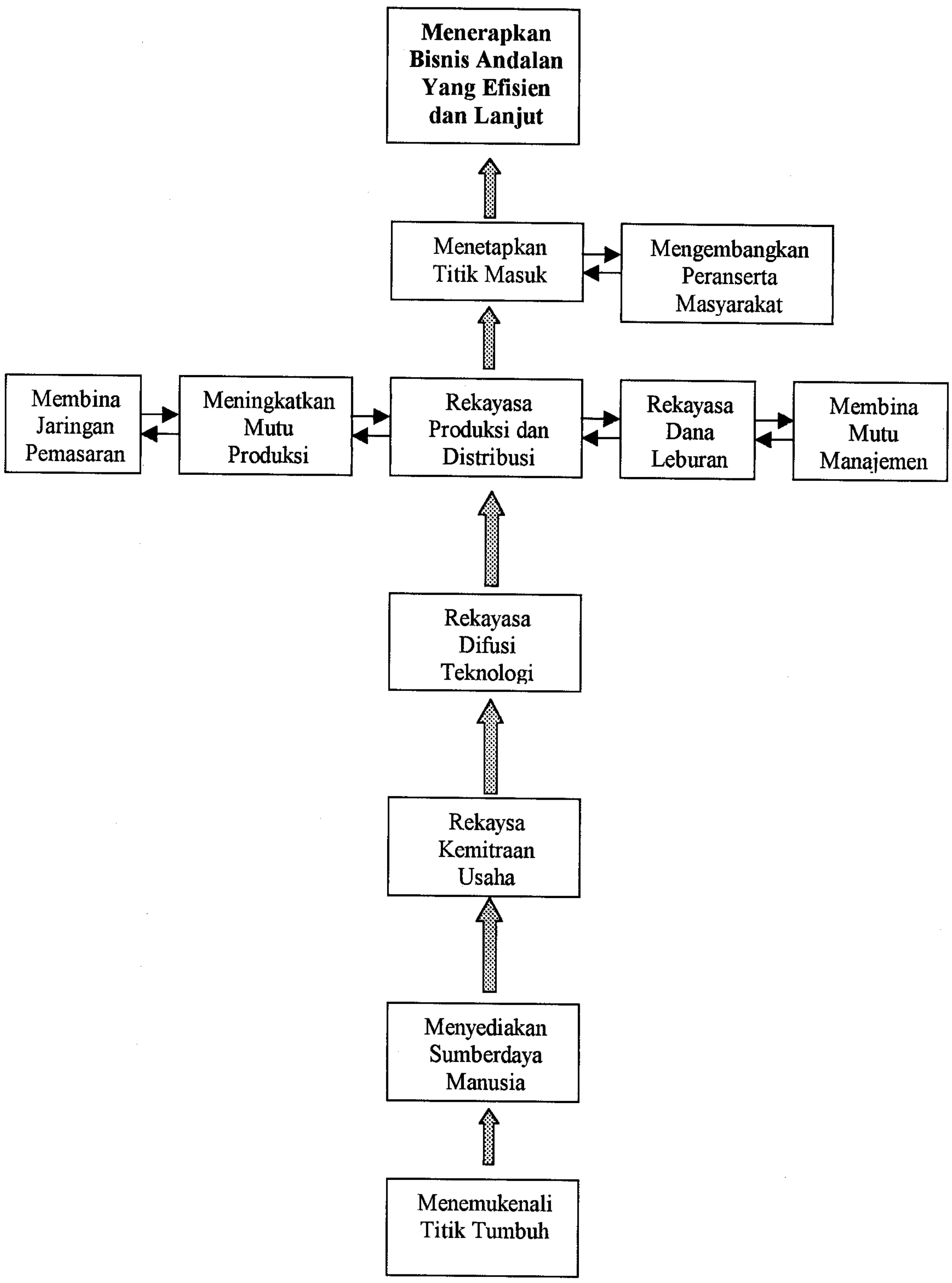

Lebih lanjut, yang tidak kalah pentingnya direkayasa adalah **jaringan bisnis**, yang wujud praktiknya adalah kerjasama usaha *(business cooperation)*. Proses perekayasaan tidak mudah dan makan waktu, oleh karena itu memerlukan dukungan instansi pemerintah untuk mempercepat. Kompleksitas proses kerjasama usaha ini dapat dijelaskan melalui Diagram Lingkar *(Causal Loop)*, yang telah diratifikasi pada Workshop Inovasi oleh European Bussiness Innovation Centre di Brussel tahun 1991 (lihat gambar 3). Dari diagram tersebut patut dicatat perbedaan lingkar pasar dan lingkar bisnis, serta perlunya suasana "damai" dalam membina kemitraan *(partnership)*. Teori jaringan seperti ini perlu dipahami sebelum mengoperasionalkan program pembangunan.

Gambar 3. Diagram Lingkaran Operasional Kerjasama Usaha

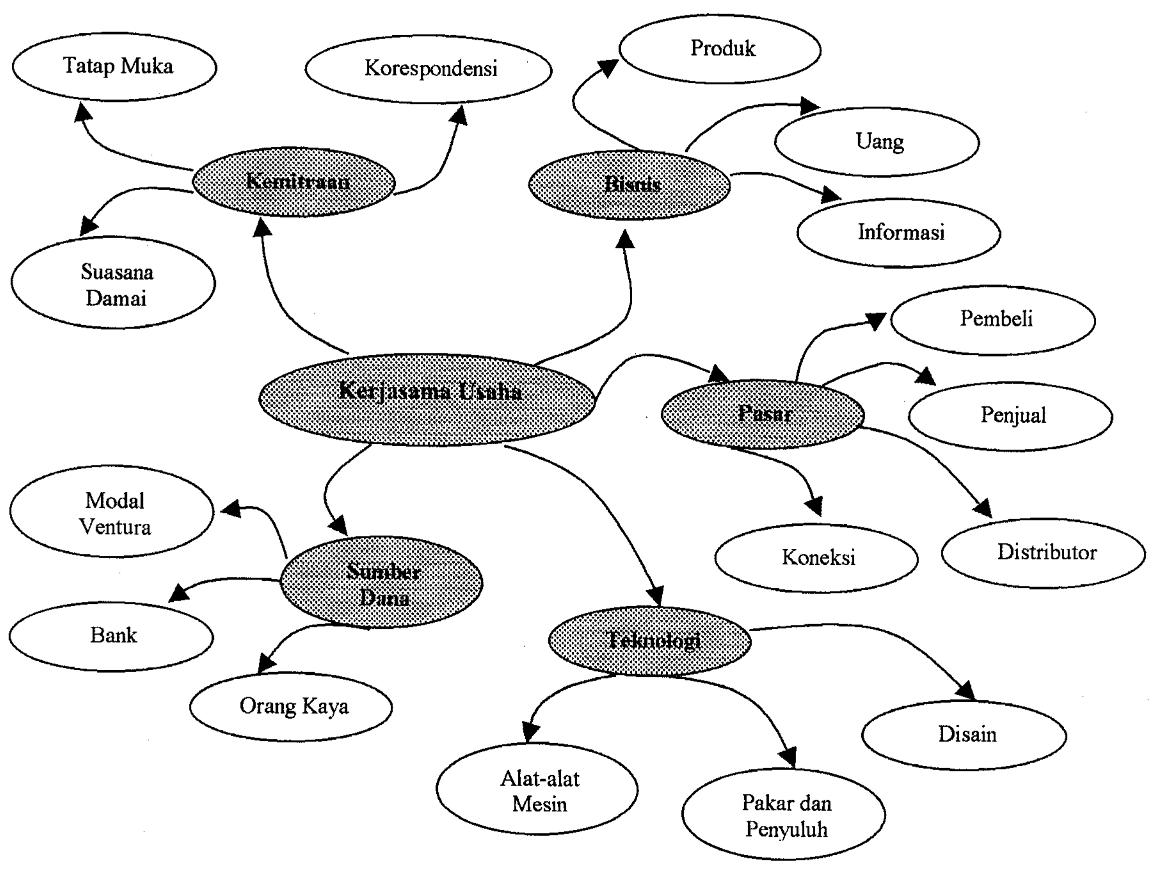

Dapat disimpulkan bahwa perwujudan Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah mutlak perlu, sebagai bukti nyata bahwa amanat penderitaan rakyat tetap menjiwai kiprah pembangunan nasional. Wujud nyata tersebut dicirikan pada kepemihakkan yang proposional pada golongan ekonomi lemah. Oleh karena itu penguatan *(strengthening)* **usaha mikro dan kecil**, khususnya di wilayah pedesaan, harus menjadi prioritas dan terus berlanjut melalui kerjasama usaha dengan segala konsekuensinya.

Penutup

Prinsip-prinsip SEKAR dengan orientasi pasar yang berkeadilan, dapat dikembangkan melalui sintesis kepentingan bersama untuk merancang suatu teori pembangunan nasional yang reformis. Penekanan perencanaan strategis akan berada pada **kreasi (penciptaan) sumberdaya** daripada alokasi sumberdaya. Fokus diarahkan pada pembangunan berkelanjutan yang melestarikan sumber daya alam dengan pemanfaatan informasi yang maksimal.

Aplikasi SEKAR harus mampu membuat pasar menjadi lebih manusiawi. *Markets are humane if they allow full and economic participation. They are humane when they offer economic oppurtunities to a maximum number of people. Markets are humane if there is no exploitation and excessively skewed income and wealth distribution. Markets are humane if they are ruled by ethical principles, if competition is fair and contracts are respected* (ASEM conference, 1997).

Ekonomi nasional seyogyanya dilihat sebagai suatu sistem kehidupan organik, terdiri atas proses-proses pengaturan SEKAR yang disusun dalam cara sintesis agar menghasilkan output yang paling memuaskan. Intervensi pemerintah akan dituntun dan bukan mengarahkan dimana Jepang, Korea dan Taiwan adalah contoh nyata. Apakah teori baru ini akan dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan? Tentunya memerlukan pengkajian lebih lanjut, dimana guru yang paling handal adalah pengalaman itu sendiri. Yang pasti, rakyat tidak menghendaki terulang kembalinya ledakan krisis ekonomi di tahun 1997 yang telah mensengsarakan rakyat banyak dan menurunkan citra bangsa dimata dunia.

Untuk semakin memudahkan pemahaman konsepsi Sistem Ekonomi Kerakyatan, maka alangkah baiknya kita merujuk pada firman Allah : *Supaya harta itu tidak hanya beredar di dalam kelompok orang-orang kaya saja diantara kamu* (Surat Al-Hasyr : 7). Dengan renungan ini, marilah bersama kita membangun Republik yang kita cintai secara ber-Sistem.

Kepustakaan

ASEM Conference, 1997. *Humane Markets for Humane Societies.* Copenhagen, Denmark.

ASEM Conference, 1999. *States and Markets.* MFA, Copenhagen. Denmark.

Checkland, P.B. 1972. Towards a System Based Methodology for Real World Problem Solving. Journal of System Engineering Vol. 3, 87 : 116.

Economic Development Institute, 1972. Poverty Allevation Trough Agricultural Project. EDI-Policy Seminar Report No. 30, The World Bank.

Flood, K.L. and M.C. Jackson, 1991. Total System Intervention, a Practical Case to Critical Systems Thinking. System Practice Vo. 4 (3), 197 : 213.

Griffin, R.C. 1991. *The Welfare Analystic of Transaction Costs, Externality dan Institutional Choice.* American Journal of Agricultural Economics Volume 73(3),601-604.

Miller, J.G. 1978. *Living Systems.* Mc-Graw Hill, New York.

Mubyarto. 2002. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Sadrudin Aga Khan. 1998. *Free Market Failures. Newsweek,* October 12-1998.(p.24c).

Saxena, J.P. et.al, 1992. Hierarchy and Clasification of Program Plan Element Using Interpretive Structural Modelling. Systems Practice, Vol. 5 (6), 651 : 670.

Waelchli, F. 1992. Eleven Theses of General System Theory (GST). System Research Vol. 9, (4), 3 : 9

Weekwa, W.H. 1995. *Living System Analysis and Neo-classical economics:*Towards a New Economic Paradigm. System Practice, Vol 8(1), 107:115